

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Dusun I Desa Karang Baru, Kec.  
Datuk Tanah Datar  
[www.dishubbatubara.co.id](http://www.dishubbatubara.co.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Datuk Tanah Datar, 10 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Batu Bara



Rubi Anto Sari Siboro, ST.,M.Si

Pembina TK I

NIP.19791213 200804 1 001



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Isu – Isu Strategis .....	3
1.4 Keadaan Pegawai .....	3
1.5 Keadaan Sarana dan Prasaran .....	4
1.6 Keuangan.....	7
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA .....	9
2.1 Perencanaan Strategis.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III .....	12
AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	14
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	33
A. Realisasi Anggaran.....	34
B. Realisasi Pendapatan.....	38
BAB IV .....	40
PENUTUP.....	40
4.1 Kesimpulan :.....	40
4.2 Saran :.....	40
LAMPIRAN.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan per Desember Tahun 2024.....	3
Tabel 1. 2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan per Desember Tahun 2024.....	3
Tabel 1. 3 Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan per Desember Tahun 2024.....	4
Tabel 1. 4 Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan .....	6
Tabel 1. 5 Anggaran Dinas perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.....	7
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan .....	10
Tabel 2. 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	11
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.....	13
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah.....	14
Tabel 3. 3 Database Sarana dan Prasara Jalan Kabupaten .....	16
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah.....	20
Tabel 3. 5 Tabel Uji Kir Kendaraan Bermotor .....	21
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah .....	29
Tabel 3. 7 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	34
Tabel 3. 9 Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2024 .....	35
Tabel 3. 10 Rekapitulasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Penyediaan Rambu – rambu lalu lintas dan Speed Bump.....	18
Gambar 3. 2 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Jalan .....	18
Gambar 3. 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PKB .....	23
Gambar 3. 4 Pengawasan Angkutan.....	24
Gambar 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah.....	24
Gambar 3. 6 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengamanan Hari Besar.....	26
Gambar 3. 7 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas .....	27
Gambar 3. 8 Pengawasan dan Sosilasi Parkir .....	28
Gambar 3. 9 Kegiatan di Perairan .....	29
Gambar 3. 10 Tampilan Aplikasi Dinas Perpustakaan.....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan
2. Mendorong Dinas Perhubungan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan tersebut menyatakan tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara yang membawahi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :
  - a. Sekretariat, terdiri dari :
  - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
  - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
  - d. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
  - e. UPT Terminal
  - f. UPT Perbengkelan Kapal
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara 12 Tahun 2021 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas Melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan pengembangan sistem dalam pelayanan jasa di bidang pengelolaan transportasi darat, laut;
4. Melaksanakan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan / terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut yang menjadi kewenangan Daerah.

### 1.3 Isu – Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas
2. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas
3. Rendahnya fasilitas pelayanan dan kebijakan parkir kendaraan
4. Kurangnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut merawat prasarana jalan. Sehingga banyaknya perlengkapan jalan yang sengaja dirusak atau dibiarkan rusak oleh masyarakat
6. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Kendaraan taat Uji Kir

### 1.4 Keadaan Pegawai

Pegawai pada Dinas Perhubungan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 1. 1 Data Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan per Desember Tahun 2024

Nama Jabatan	Jumlah	Satuan
Pejabat Eselon II	1	Orang
Pejabat Eselon III	3	Orang
Pejabat Eselon IV	13	Orang
Jabatan Fungsional	24	Orang
Jumlah	41	Orang

- b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Tabel 1. 2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan per Desember Tahun 2024

Golongan/	Jumlah	Satuan
Golongan IV.b	3	Orang

Golongan IV.a	2	Orang
Golongan III.d	7	Orang
Golongan III.c	8	Orang
Golongan III.b	1	Orang
Golongan III.a	9	Orang
Golongan II.d	1	Orang
Golongan II.c	8	Orang
Golongan II.b	1	Orang
Golongan II.a	1	Orang
Jumlah	41	Orang

c. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 3 Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan per Desember Tahun 2024

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
S2	7	Orang
S1	16	Orang
D4	5	Orang
D3	10	Orang
D2	1	Orang
SMA/SMK/MA	2	Orang
Jumlah	41	Orang

Selain jumlah di atas terdapat pula Tenaga Honorer sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- S1 = 15 Orang
- D4 = 2 Orang
- D3 = 1 Orang
- D2 = 1 Orang
- SMA = 64 Orang
- SMP = 5 Orang
- SD = 1 Orang
- Jumlah = 89 Orang**

## 1.5 Keadaan Sarana dan Prasaran

### a. Gedung Kantor

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten batu bara terletak di Jalan Lintas

Sumatera

Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara -21254. Gendung Kantor Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat, dan Bidang Umum Kepegawaian dan Ruang Rapat menempati gedung yang berada di tengah (gedung utama kantor).
2. Ruang kerja Bidang Prasarana dan keselamatan, Aset, Ruang Bidang Keuangan dan Program dan Musholla menempati gedung sebelah kanan gedung utama.
3. Ruang kerja Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan angkutan, Tempat Parkir, Ruang reperasi perlengkapan jalan menempati gedung sebelah kiri gedung utama

**b. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

1. UPT Pengujian kendaraan Bermotor terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara.
2. UPT Pengujian kendaraan Bermotor terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara.
3. Kantor UPT Terminal terletak di Labuhan Ruku Kecamatan Talawi.

**c. Kendaraan Dinas**

1. Unit Mobil Dinas Kepala Dinas
2. Unit Mobil Dinas Sekretaris Dinas
3. 1 unit double cabin untuk Operasional Patwal
4. 1 unit mobil pick-up untuk Pemeliharaan Rambu, Marka dan Lampu Lalu Lintas
5. Unit bus perintis

6. Unit Bus Eksekutif yang digunakan untuk Kepentingan – Kepentingan tertentu guna meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan yang menunjang urusan pemerintah Kabupaten Batu Bara
7. 2 Unit Kendaraan Operasional roda dua yang digunakan untuk pengawalan dan operasi pelayanan di lingkungan Kabupaten Batu Bara

**d. Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan**

Tabel 1. 4 Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan

No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi 2024	Keterangan
1.	Ruang Rapat	2	1	
2.	Tempat Parkir	3	2	
3.	Ruang Reparasi Perlengkapan Jalan	1	1	Ruangan tidak memadai dan terlalu sempit
4.	Tempat penyimpanan sapras rambu	1	-	Belum ada ruangan yang khusus untuk penyimpanan
5.	Ruang Dharmawanita	1	-	
6.	Kendaraan roda 4	10	15	Belum ada mobil untuk keperluan operasional sekretariat, belum adanya mobil Crane untuk perbaikan LPJU dan kurangnya jumlah bus perintis
7.	Kendaraan roda 2 patwal	4	2	

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi

Dinas Perhubungan pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp8.545.618.902,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

Belanja operasi dan Belanja Modal yang berasal dari APBD sebesar Rp8.545.618.902,00 yang didukung oleh 3 program dan 13 kegiatan serta 32 sub.kegiatan.

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Anggaran Dinas perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Jenis Belanja / Program	Anggaran DPPA (Rp.)
PENDAPATAN	
BELANJA DAERAH	Rp8.545.618.902,00
BELANJA OPERASI	Rp8.377.418.902,00
BELANJA MODAL	Rp168.200.000,00
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.466.348.197,00
II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp998.270.705,00
III. Program Pengelola Pelayaran	Rp81.000.000,00

## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

#### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

### **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-Lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana strategis (renstra) dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi pembangunan kabupaten batu bara yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penetapan jangka waktu tiga tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban bupati terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (rpjmd) kabupaten batu bara tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rpjmd maupun forum skpd, sehingga renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dengan stakeholder. Selanjutnya, renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tersebut dijabarkan kedalam rencana kerja (renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara untuk periode 1 (satu) tahun. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Nama Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA

Melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan

a. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan pengembangan sistem dalam pelayanan jasa di bidang pengelolaan transportasi darat, laut;

d. Melaksanakan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan / terminal dan pengelolaan parkir, pelabuhan laut yang menjadi kewenangan Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Keselamatan Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Keelamtan jalan yg tersedia}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Keelamtan jalan yg dibutuhkan}} \times 100\%$	Bidang Prasarana Dan Keselamatan	Dishub Kabupaten Batu Bara
		Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan yg Lulus Uji}}{\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$	UPTD PKB	Dishub Kabupaten Batu Bara
		Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani}}{\text{Jumlah titik kemacetan}} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Dishub Kabupaten Batu Bara
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai Baku yang di peroleh dari LHR	Sekretariat	Inspektorat

Dalam hal pelaksanaan Sasaran Strategis tersebut diatas ditetapkan 3 (tiga) program kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 “Meningkatnya Keselamatan Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur” dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelola Pelayaran;
2. Sasaran 2 “Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat” dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

**2.2 Perjanjian Kinerja**

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara mengacu pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2024 atau disebut perubahan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2024. Yang mana didalamnya disusun dan ditetapkan indikator kinerja yang diperjanjikan antara kepala dinas

Perhubungan kepada bupati batu bara, antara pejabat eselon III kepada kepala dinas, antara pejabat eselon IV dan ketua tim kepada pejabat eselon III di atasnya. Adapun perencanaan kinerja kepala dinas kepada bupati batu bara pada perubahan perjanjian

kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	60
		Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan	%	80
		Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani	%	60
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (75,00)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.466.348.197	PAPBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	998.270.705	PAPBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	81.000.000	PAPBD
	<b>Total</b>	<b>8.545.618.902</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolak ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja in put, out put dan out comes.

Secara umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut

Indikator Kinerja Tahun 2024 yang di tetapkan di ambil melalui Recana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan. Sedangkan Realisasi dihitung melalui rumus formula. Data yang diambil untuk menghitung persentase realisasi melalui data kegiatan serta data yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-

rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2024 yang telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang mana pada Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	60	71.94	119
		Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan	%	80	59.38	74
		Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani	%	60	76.92	128
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (75.00)	70.08	93

Dari tabel 3.1. diatas dapat dihitung bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah 103.5 %. Analisis pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dimulai dengan mengukur pencapaian target masing-masing sasaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja sarannya. Tabel diatas menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja Dinas Perhubungan melebihi

target 100% dan 2 (dua) indikator kinerja Dinas Perhubungan belum dapat mencapai target di karenakan bebrapa hal.

Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dimasa mendatang akan terus menerus melakukan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran. Ini bertujuan agar diketahui sejauh mana capaian keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran dan alternatif solusi yang dilakukan. Selain itu, dilakukan pula analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran sehingga dapat diukur efektifitas dan efisiensi anggaran program terhadap pencapaian kinerja sasaran dan diketahui apakah pencapaian kinerja sasaran hanya tergantung dari segi pendanaan atau ada faktor lain yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerjanya.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>
1.Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran 1.

Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang diambil dari target jangka menengah yang sudah di sesuaikan ke Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

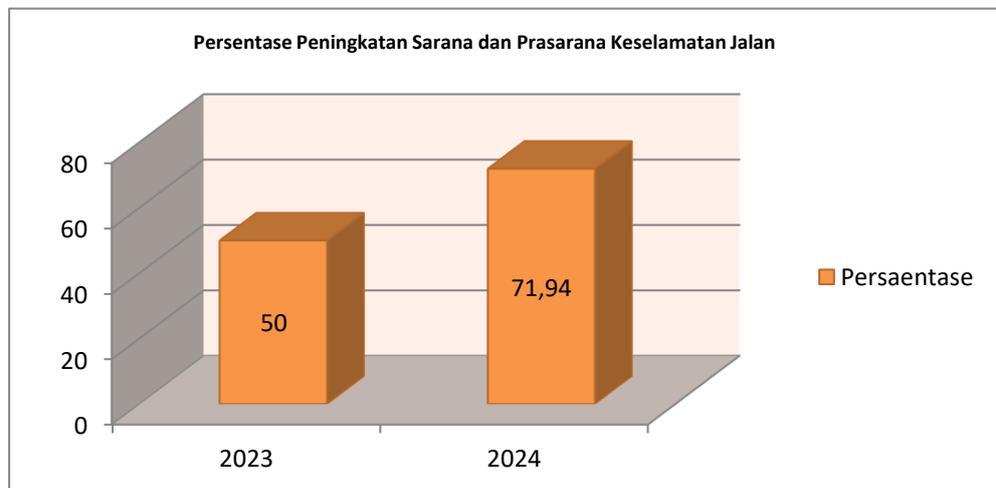
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja			Realisasi	
			2024	2025	2026	2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	50.00%	60.00%	65.00%	70.00%	71.94	119

	Keselamatan Jalan						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

1. Kondisi awal periode RPJMD tahun 2023 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan memperoleh nilai 50.00 %. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan tahun 2024 mencapai 71.94% dari target 60.00% diperoleh dari rumus yang sudah ditetapkan yakni hasil dari Jumlah Sarana dan Prasarana Keelamtan jalan yg tersedia sebanyak 3.597 di bagi Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamtan jalan yg dibutuhkan 5.000 dan dikali 100 persen dan jika dipersentasekan tingkat capaiannya 119 % dalam hal ini tingkat capaian sudah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan dari sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), perbandingan dari tahun ke tahun, dapat dilihat melalui grafik berikut:

*Grafik 3.1 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan*



Adapun permasalahan dan solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut.

Permasalahan :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas keselamatan jalan yang ada

2. Belum optimalnya pengadaan prasarana keselamatan lalu lintas jalan
3. Tingginya Tindakan Pencurian dan Tindakan Vandalisme terhadap prasarana keselamatan lalu lintas jalan.

Solusi :

1. Dilakukanya survey rutin untuk pengecekan keberadaan dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.
2. Pengalokasian Anggaran Khusus untuk Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, Deliniator) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa lampu penerangan jalan umum;
3. Sosialisasi dan Pembuatan Spanduk Peringatan, Pemantauan titik rawan Vandalisme maupun Aktivitas Kelompok yang mengarah Aksi Vandalisme serta Menindak Tegas Pelaku melalui Penegak Hukum

Capaian indikator kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan. Pada tahun 2024 untuk indikator kinerja ini di dukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan jalan yang memadai. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, dan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 328.559.469,- terealisasi Rp324.621.970,- atau sebesar 98.80%.

Tabel 3. 3 Database Sarana dan Prasara Jalan Kabupaten

NO	NAMA RAMBU	KEADAAN RAMBU				
		JUMLAH	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG
1	Total Rambu dan Deliniator Kabupaten Batu Bara	1353	644	273	136	300

2	Total RRPJ tiang pendek	14	5	3	6	
3	Total RRPJ tiang tinggi	57	30	10	17	
4	Total Papan Himbauan	22	2	20		1
5	Total Halte	17	17			
6	Total Warning Light	18	18			
7	Total Rambu Plank Nama Jalan	0	0	0	0	31
8	Total LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	2082	1314	300	468	
9	Total Lampu Sorot	18	18			
10	Total Traffic Light	4	4			
11	Total Portal	12	11	1		
<b>TOTAL KESELURUHAN RAMBU.....</b>		<b>3597</b>	<b>2063</b>	<b>607</b>	<b>627</b>	<b>332</b>
<b>Total Kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas LLAJ Lainnya dari Tahun 2024 s/d 2028 sebanyak</b>			<b>5.000</b>	<b>buah</b>		
<b>Total sisa kebutuhan rambu rambu lalu lintas dan fasilitas LLAJ lainnya dari tahun 2024 s/d 2028 sebanyak</b>			<b>1.403</b>	<b>buah</b>		

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas dan Speed Bump. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 141.500.000,- dan terealisasi Rp141.112.000,- atau sebesar 99,73%.Pemasangan perlengkapan jalan pada sub kegiatan ini terdiri dari :

- a. Jumlah Rambu – Rambu Lalu Lintas 30 unit
- b. Jumlah Pemasangan Speed Bump 80 Meter (20 titik)

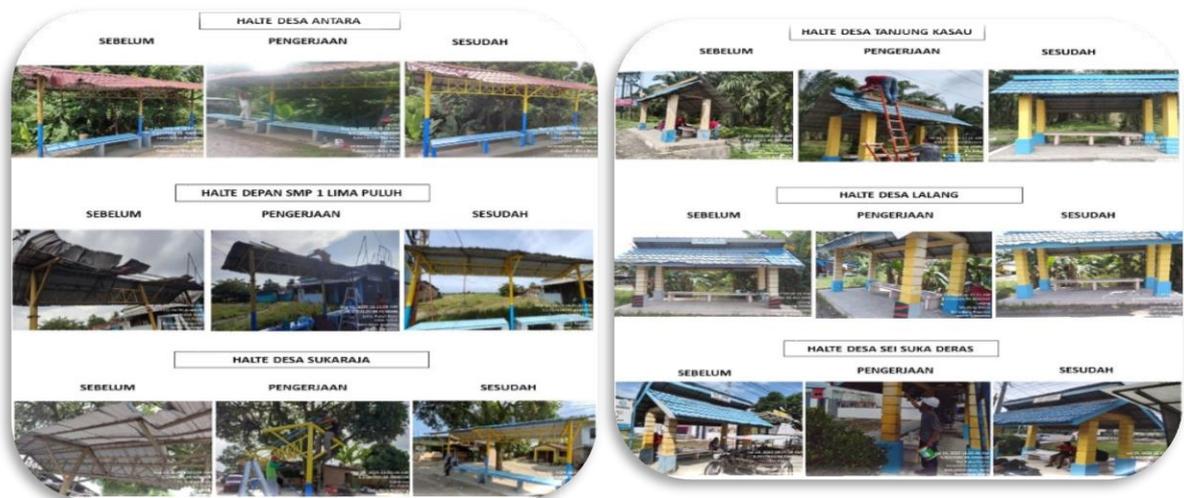
Gambar 3. 1 Penyediaan Rambu – rambu lalu lintas dan Speed Bump



## 2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan Prasarana jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya Halte di Kabupaten Batu Bara. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 32.750.000,- terealisasi sebesar Rp32.750.000,- atau sebesar 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/ pemeliharaan 8 unit Halte.

Gambar 3. 2 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Jalan





### 3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan perlengkapan jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya suku cadang untuk pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas, pemeliharaan warning light, rehabilitasi papan himbauan dan RPPJ. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp154.309.469,- terealisasi sebesar Rp150.759.970,- atau sebesar 97,70%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya perlengkapan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara dengan volume pekerjaan sebanyak 38 unit Rambu – rambu lalulintas dan perlengkapan jalan lainnya.

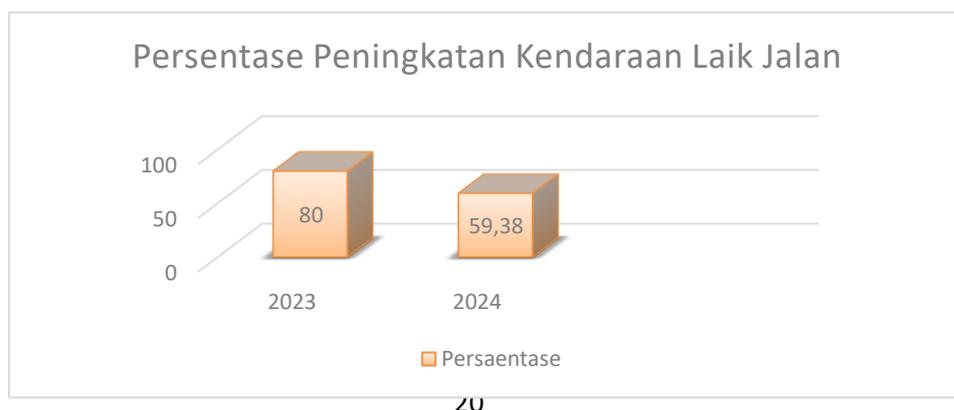


Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja			Realisasi	
			2024	2025	2026	2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan	70.00%	80.00%	85.00%	90.00%	59.38	74

2. Kondisi awal periode RPJMD tahun 2023 Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan memperoleh nilai 70.00 %. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan tahun 2024 mencapai 59.38% dari target 80.00% diperoleh dari rumus yang sudah ditetapkan yakni hasil dari Jumlah Kendaraan yg Lulus Uji sebanyak 1.063 di bagi Jumlah Kendaraan Wajib Uji 1.790 dan dikali 100 persen dan jika dipersentasekan tingkat capaiannya 74 % dalam hal ini tingkat capaian belum mencapai target yang telah ditetapkan dan terjadinya penurunan angka kendaraan yang melakukan uji kendaraan dikarenakan adanya kerusakan pada alat pengujian yang mengakibatkan pengujian tidak dapat dilakukan beberapa waktu. Pencapaian indikator Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan dari sasaran Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), perbandingan dari tahun ke tahun, dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 3.2 Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan



Adapun permasalahan dan solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut.

Permasalahan :

1. Adanya Kerusakan pada Alat Uji pada bulan Januari- maret sehingga tidak dapat mengoptimalkan pengujian
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kendaraan

Solusi :

4. Dilakukanya kalibrasi dan perawatan rutin untuk alat pengujian kendaraan:
5. Melaksanakan sosialisasi aturan yang berlaku terkait pentingnya adanya dokumen KIR layak uji yang masih berlaku dari Dinas Pehubungan yang menyatakan bahwa kendaraan laik jalan.
6. Menindak Tegas Pelaku melalui Penegak Hukum bagi kendaraan yang tidak laik jalan

Capaian indikator kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Peningkatan Kendaraan Laik Jalan. Pada tahun 2024 untuk indikator kinerja ini di dukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari kegiatan ini adalah peningkatan kelaikan operasional kendaraan bermotor dengan adanya uji kendaraan bermotor yang dilaksanakan di pengujian kendaraan bermotor. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kelaikan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor dengan meningkatkan keselamatan berlalu lintas dari sarana atau kendaraan khususnya kendaraan angkutan barang dan angkutan orang. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 37.000.000,- atau sebesar 100%. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Tabel Uji Kir Kendaraan Bermotor

JENIS KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN	
	2023	2024

MOBIL BARANG	2853	1024
MOBIL PENUMPANG	19	3
MOBIL BUS	126	33
TRAILER	8	3
BETOR	0	0
KHUSUS	0	0
<b>TOTAL KENDARAAN</b>	<b>3006</b>	<b>1063</b>

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat pengujian yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar alat yang di gunakan untuk pengujian kendaraan valid dan dapat di pergunakan semaksimal mungkin. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 37.000.000,- dan terealisasi Rp 37.000.000,- atau sebesar 100%.Alat pengujian yang terpelihara antara lain:

1. Alat Uji Mesin Break Tester
2. Alat Uji Mesin Gas Analyzer
3. Alat Uji Mesin Axle Load
4. Alat Uji Mesin Smoke Tester
5. Alat Uji Mesin Side Slip Tester
6. Alat Uji Mesin Speedometer Tester
7. Alat Uji Mesin Headlight Tester
8. Alat Uji Mesin Sound Level
9. Alat Uji Mesin Tint Tester
10. Alat Uji Mesin Kedalaman Alur Ban

Gambar 3. 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PKB



## 2. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan dan survey lalu lintas guna perencanaan angkutan yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan studi pelayanan angkutan dan survey angkutan. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 151.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp 149.818.500,- atau sebesar 98,67%. Hal ini disebabkan analisis data base pelayanan angkutan dan survey lalu lintas tidak dapat di realisasikan karena ketersediaan dana Kas daerah namun kegiatan tetap di laksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah laporan dokumen survey angkutan yang terdiri dari Laporan data data base angkutan 1 dokumen dan laporan survey Volume Harian Rata -rata (LHR).

Gambar 3. 4 Pengawasan Angkutan

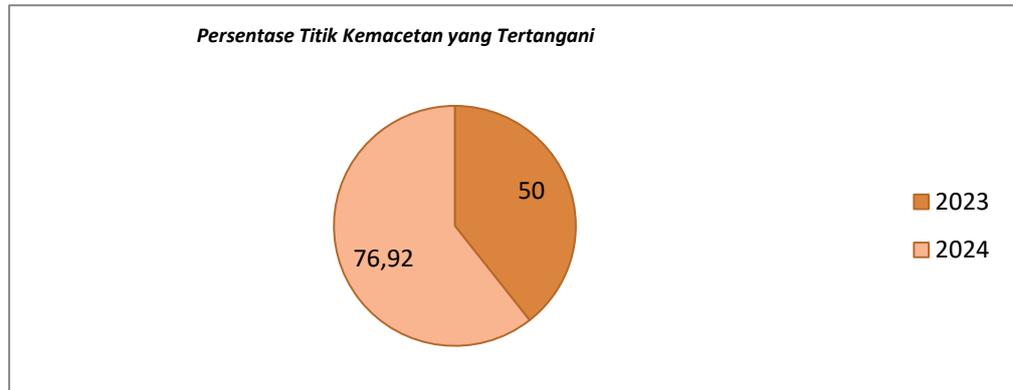


Gambar 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja			Realisasi	
			2024	2025	2026	2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	76.92	128

3. Kondisi awal periode RPJMD tahun 2023 Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani memperoleh nilai 50.00 %. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani tahun 2024 mencapai 76.92% dari target 60.00% diperoleh dari rumus yang sudah ditetapkan yakni hasil dari Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani 10 di bagi Jumlah titik kemacetan 14 di kali seratus persen dan jika dipersentasekan tingkat capaiannya 128 % dalam hal ini tingkat capaian sudah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani dari sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), perbandingan dari tahun ke tahun, dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 3.3 Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani



Adapun permasalahan dan solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut.

Permasalahan :

1. Pengguna jalan yang tidak tertib, melawan arus, dan berpindah jalur seenaknya
2. Parkir kendaraan di sembarang tempat, seperti di badan jalan
3. Aktivitas di samping badan jalan, seperti pedagang kaki lima
4. Fasilitas transportasi umum yang belum memadai

Solusi :

1. Dilakukanya Pengawasan oleh petugas lalu lintas
2. Dilaksanakanya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan melalui Penegak
4. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum

Capaian indikator kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan. Pada tahun 2024 untuk indikator kinerja ini di dukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah penurunan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Batu Bara dengan memberikan pelayanan pengamanan lalu lintas. Tujuan kegiatan ini adalah upaya peningkatan Kelancaran dan keselamatan berlalu dalam berlalulintas. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 379.278.096,- dan terealisasi sebesar Rp 371.455.000,- atau sebesar 97,94%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas lalu lintas. Tujuan sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan lalu lintas pada ruas jalan kabupaten pada kondisi normal dan kondisi situasional khususnya pada perayaan natal dan tahun baru serta hari – hari besar lainnya. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 218.465.000,- dan terealisasi sebesar Rp 218.465.000,- atau sebesar 100%.

Gambar 3. 6 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengamanan Hari Besar



2. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dengan cara pengamanan lalulintas oleh personil pengatur lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara di persimpangan jalan dan titik – titik berkumpulnya masyarakat seperti tempat perbelanjaan dan kegiatan – kegiatan

pimpinan. Tujuan sub kegiatan ini adalah peningkatan keselamatan lalu lintas dan mengurangi titik kemacetan di Kabupaten Batu Bara. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 160.813.096,- dan terealisasi sebesar Rp 152.990.000,- atau sebesar 95,14%.

Gambar 3. 7 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas



## 2). Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Parkir Kewenangan Kabupaten Batu Bara. Tujuan dari kegiatan ini untuk peningkatan PAD Retrbusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten batu bara. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp46.272.619,- terealisasi Rp44.562.500,- atau sebesar 96.30%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu :

### 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pengengawasan parkir yang di adakan setiap bulanya dan sosialisasi parkir dengan peserta 50 orang. Rp 52.943.140,- terealisasi Rp 51.232.000,- atau sebesar 96.77%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya PAD parkir dari tahun – tahun sebelumnya.

Gambar 3. 8 Pengawasan dan Sosilasi Parkir



### 3). Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan dan rekomendasi andalalin guna menganalisis kondisi lalu lintas yang ada saat ini dan dalam waktu hingga 5 tahun ke depan yang merupakan dampak dari bangunan atau tempat- tempat tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan rekomendasi andalalin. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 48.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp 48.433.000,- atau sebesar 99,55%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin. Output dari sub kegiatan ini adalah 1 Doumen Rekomendasi Andalalin.

### 4.) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan di perairan seperti Survey Alur pendataan Kapal 0 Gt dan pengawalan pejabat dalam pelaksanaan perjalanan ke Pulau Pandang dan Pulau Salah Nama. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 81.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 80.967.500,- atau sebesar 99,96%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan

Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah laporan survey alur dan dokumen Kapal 0 Gt.

Gambar 3. 9 Kegiatan di Perairan



### Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, yang diambil dari target jangka menengah yang sudah di sesuaikan ke Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

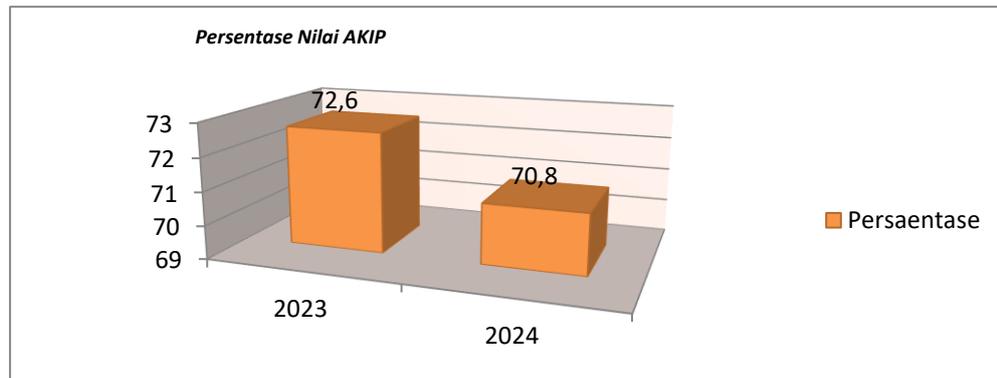
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja			Realisasi	
			2024	2025	2026	2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai AKIP	BB	BB (75.00)	BB	A	BB 70.08	93

Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengalami penurunan dan tidak dapat mencapai target yang direncanakan/ diperjanjikan dengan persentase capaian indikator 93% Yang mana pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

diharapkan nantinya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara meningkat menjadi 75.00 (BB) setelah sebelumnya pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara memperoleh Nilai Akip sebesar 72.6 (BB). Jika dibandingkan dengan Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah mengalami penurunan 1.8%.

Grafik 3.3 Persentase Nilai AKIP



Nilai AKIP Dinas Perhubungan diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan yang di evaluasi oleh tim Inspektorat kabupaten Batu Bara tahun 2024. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2023 menunjukkan kategori BB( Baik Sekali) dengan nilai sebesar 79,20 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja bobot 30,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 24,7 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja ( PK) tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja dengan kriteria baik yang berorientasi hasil (Outcome) dan selaras dengan RPD kabupaten Batu Bara tahun 2024-2026 dan telah membuat Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja yang telah dijanjikan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024;
2. Pengukuran Kinerja bobot 30,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 20, 0 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah menyusun Indikatir Kinerja Utama (IKU) sebagai pengukuran kinerja secara formal untuk penilaian kinerja;

3. Pelaporan Kinerja bobot 15,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 9.6 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah menyusun Laporan Kinerja dan disampaikan tepat waktu dan sudah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dinas, pencapaian sasaran yang berorientasi outcome sesuai yang disajikan serta terdapat evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 16,5 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah melakukan evaluasi internal mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya namun hasil evaluasi tidak terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tim penilai AKIP, masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kinerja

- Renja dan Renstra belum di publikasikan; pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan telah mengaktifkan kembali website Dinas Perpustakaan dan telah mempublikasikan dokumen dokumen yang berkaitan dengan Perpustakaan seperti Renja dan Renstra; dapat dibuktikan melalui gambar di bawah ini;

Gambar 3. 10 Tampilan Aplikasi Dinas Perpustakaan



#### b. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam

penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional; Dinas Perhubungan akan mengimplementasikan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional

#### **c. Pelaporan Kinerja**

- Laporan kinerja belum dipublikasikan; pada tahun 2024 Dinas Perhubungan telah mengaktifkan kembali website Dinas Perhubungan dan telah mempublikasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perpustakaan salah satunya yakni Laporan Kinerja; dapat dibuktikan melalui gambar di bawah ini;
- Masih kurangnya informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam menjabai kinerja dalam laporan kinerja; pada Laporan kinerja tahun 2024 Menginformasikan ada/tidak realisasi kinerja skala nasional/internasional pada Dinas Perhubungan

#### **d. Akuntabilitas Kinerja**

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti; Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun sebelumnya dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut, kemudian menyerahkan ke Inspektorat Daerah sebagai evaluator dan pemberi rekomendasi tindak lanjut.

Kemudian untuk mewujudkan kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah” dicapai melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Yang mana melalui program dan kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian outcome yang direncanakan bahwa untuk meningkatkan nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara perlu dipenuhi dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan OPD antara lain sebagai berikut:

- Standart Operasional Prosedur (SOP)
- Pohon Kinerja/ cascading kinerja dari pejabat eselon II sampai dengan eselon IV;
- Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD dan IKU;
- Rencana Kerja (Renja);
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD;
- Perjanjian Kinerja OPD sampai dengan tingkat eselon IV dan Ketua tim;
- Rencana Aksi dan laporan evaluasi kinerja triwulanan;

- Risk Register Dinas Perhubungan berserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja Peningkatan Nilai AKIP Dinas Perhubungan tahun 2024 dipengaruhi faktor sebagai berikut:

1. Adanya pelaksanaan Kegiatan – kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 7.466.348.197,- dengan realisasi Rp. 6.831.929.464.- sama dengan 91,50% yang mendukung Seluruh kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan peningkatan Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Ta. 2024.

Kemudian dalam rangka perbaikan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah” pada masa mendatang, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara perlu melakukan tindak lanjut sebagai berikut;

1. Menyusun dokumen basis data sebagai acuan perencanaan dan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara kedepan yang Update;
2. Menggunakan IKU terbaru sesuai dengan peraruran bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan itu telah dimulai pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dijadikan acuan pengukuran pada Laporan Kinerja Tahun 2024;
3. Memperbaiki cara penyajian laporan kinerja tahun 2024 dengan sebaik mungkin mengikuti arahan atau rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan mengikuti kaidah penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Ada beberapa kegiatan yang menunjukkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 7 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	60	71,94	119,90	Rp 328.559.469	Rp 324.621.970	98,80	1,19
		Persentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan	%	80	59,38	74,23	Rp 188.840.000	Rp 186.818.500	98,93	0,73
		Persentase Titik Kemacetan yang Tertangani	%	60	76,92	128,20	Rp 561.871.236	Rp 552.087.500	98,26	1,27
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75	70,08	93,44	Rp 7.466.348.197	Rp 6.446.546.922	86,34	0,93

Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

#### A. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara mengalokasikan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Targ et	Reali sasi	%
<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 106.500.000	10,65
<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>Belanja Operasi</b>	Rp. 8.377.418.902,00,-	Rp. 7.727.637.434,00,-	92,24
<b>Belanja Modal</b>	Rp. 168.200.000,00 -.	Rp. 167.820.000,00 -.	99,77
<b>Jumlah</b>	Rp. 8.545.618.902,00 -.	Rp. 7.895.457.434,00,-.	92,39

Penyerapan anggaran belanja Operasi pada tahun 2024 sebesar 92.39% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan

penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3. 9 Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2024

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target		Realisasi		%				
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75,00	%	7.466.348.197	70,08	%	6.831.929.464	93,44	%	91,50
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan yang Tersedia	100,00	%	58.840.000	100	%	45.726.000	100,00	%	77,71
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	29.420.000	3	Dokumen	26.206.000	100,00		89,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	29.420.000	4	Laporan	19.520.000	100,00	%	66,35

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	100	%	4.050.549.279	100	%	3.602.363.914	100,00	%	88,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang/bulan	4.013.169.279	38	Orang/bulan	3.564.983.914	100,00	%	88,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	18.690.000	1	Laporan	18.690.000	100,00	%	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18.690.000	18	Laporan	18.690.000	100,00	%	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian</b>	100	%	67.000.000	100	%	65.434.936	100,00	%	97,66
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	67.000.000	6	Orang	65.434.936	100,00	%	97,66
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	%	522.946.518	100	%	496.012.042	100,00	%	94,85
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Terpenuhi	4	Paket	32.713.155	4	Paket	32.711.281	100,00	%	99,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Peralatan Kantor yang Disediakan	4	Paket	51.784.528	4	Paket	37.424.500	100,00	%	72,27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	72.569.835	12	Paket	72.433.077	100,00	%	99,81
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	76.779.000	4	Paket	67.879.000	100,00	%	88,41
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	36.000.000	12	Dokumen	34.500.000	100,00	%	95,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	253.100.000	12	Laporan	251.064.184	100,00	%	99,20

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	100	%	998.270.705	100	%	982.560.470	100,00	%	98,43
	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	41,00	%		41,00	%		100,00	%	
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	35,00	%		35,00	%		100,00	%	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten	100	%	328.559.469	100	%	324.621.970	100,00	%	98,80
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang Tersedia	50	Unit	141.500.000	50	Unit	141.112.000	100,00	%	99,73
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	8	Unit	32.750.000	8	Unit	32.750.000	100,00	%	100,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	38	Unit	154.309.469	38	Unit	150.759.970	100,00	%	97,70

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	%	52.943.140	100	%	51.232.000	100,00	%	96,77
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	12	Laporan	52.943.140	12	Laporan	51.232.000	100,00	%	96,77
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	%	37.000.000	100	%	37.000.000	100,00	%	100,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	Unit	37.000.000	10	Unit	37.000.000	100,00	%	100,00

Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang Terlaksana	100	%	379.278.096	100	%	371.455.000	100,00	%	97,94
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	218.465.000	6	Laporan	218.465.000	100,00	%	100,00
Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	Laporan	160.813.096	4	Laporan	152.990.000	100,00	%	95,14
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Rekomendasi Andalalin</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>48.650.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>48.433.000</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>99,55</b>
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4	Laporan	48.650.000	4	Laporan	48.433.000	100,00	%	99,55
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>151.840.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>149.818.500</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>98,67</b>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	151.840.000	12	Laporan	149.818.500	100,00	%	98,67
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota</b>	<b>41,00</b>	<b>%</b>	<b>81.000.000</b>	<b>41,00</b>	<b>%</b>	<b>80.967.500</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>99,96</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>81.000.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>80.967.500</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>99,96</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten	12	Laporan	81.000.000	12	Laporan	80.967.500	100,00	%	99,96
				<b>8.545.618.902</b>			<b>7.895.457.434</b>			<b>92,39</b>

## B. Realisasi Pendapatan

Salah satu penggerak keuangan daerah adalah daerah yang bersangkutan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, ketentuan

perundang-undangan menetapkan pokok-pokok kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pungutan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang prima diutamakan prinsip partisipasi yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, kegiatan melalui proses temu publik, dialog dan konsultan.

Adapun Rekapitulasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara target PAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Rekapitulasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara

No	PAD Dinas Perhubungan	Rp
1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	106.500.000
<b>Total</b>		<b>106.500.000</b>

Adapun permasalahan secara umum dalam Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah :

- Kurangnya Pengawasan dari Petugas dan adanya pemungutan parkir liar oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Tingginya Target yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan titik parkir yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan yang dicapai Dinas Perhubungan berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

#### **4.1 Kesimpulan :**

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Persentase Peningkatan Sarana dan Prasaran Keselamatan Jalan telah mencapai target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
2. Persentase Titik Kemacetan yang tertangani juga mencapai target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
3. Presentase Peningkatan Kendaraan Laik Jalan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan
4. Indikator Kinerja utama Nilai AKIP dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah tidak memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
5. Empat (4) Indikator Program yang mendukung indikator kinerja utama telah memenuhi target dari yang ditetapkan.

#### **4.2 Saran :**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui;
3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Batu Bara;
4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka,

Deliniator) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa lampu penerangan jalan umum;Koordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksanaan perbaikan jalan

## LAMPIRAN











KM. 119 Jalan Lintas Sumatra  
Perkebunan Lima Puluh  
Kecamatan Lima Puluh  
Kabupaten Batu Bara  
Sumatera Utara  
4 Nov 2024 07.44.13



8 Des 2024 08.28.06  
Jalan Tanpa Nama  
Perupuk  
Kecamatan Lima Puluh  
Kabupaten Batu Bara  
Sumatera Utara



29 Nov 2024 07.14.16  
50 Jalan Lintas Sumatra  
Perkebunan Lima Puluh  
Kecamatan Lima Puluh  
Kabupaten Batu Bara  
Sumatera Utara



29 Nov 2024 07.14.16  
50 Jalan Lintas Sumatra  
Perkebunan Lima Puluh  
Kecamatan Lima Puluh  
Kabupaten Batu Bara  
Sumatera Utara